

# KEPUTUSAN KOREA UTARA MEMBATALKAN UPAYA REUNIFIKASI KOREA

## *(NORTH KOREA'S DECISION TO CANCEL EFFORTS THE KOREAN REUNIFICATION)*

Deby Liviamanda<sup>1</sup>, Drs. Abubakar Eby Hara, MA, Ph.D<sup>2</sup>, Suyani Indriastuti, S.Sos., M.Si<sup>3</sup>  
Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember (UNEJ)  
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121  
E-mail: [DPU@unej.ac.id](mailto:DPU@unej.ac.id)

### Abstrak

Sejak terbaginya dua Korea menjadi dua negara yang bertentangan secara ideologi dan politik pada tahun 1953. Pembagian tersebut berdampak pada hubungan kedua Korea yang tidak harmonis. Upaya damai dimulai dengan saling membuka komunikasi dan hubungan baik antar Korea. Hubungan antar Korea tidak lagi sekedar persaingan dan permusuhan namun, berorientasi pada kerjasama reunifikasi Korea. Upaya Reunifikasi Korea terakhir kali dirumuskan melalui kesepakatan antara Korea Utara dan Korea Selatan dalam Konferensi Tingkat Tinggi antar-Korea pada tahun 2000. KTT tersebut untuk menyatukan kembali kedua Korea menjadi sebuah negara baru yaitu negara Korea Bersatu. Namun, pada tahun 2009 Korea Utara membuat keputusan yaitu membatalkan upaya reunifikasi Korea. Dalam artikel ilmiah ini penulis tertarik untuk menganalisa keputusan Korea Utara membatalkan upaya reunifikasi Korea yang telah disepakati pada KTT Korea tahun 2000. Penulis memutuskan untuk menganalisa tentang Reunifikasi Korea saja karena latar belakangnya yang kompleks. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor keputusan Korea Utara membatalkan upaya reunifikasi Korea pada tahun 2009. Adapun metode penelitian yang diterapkan oleh penulis ialah metode penelitian kualitatif. Metode ini merujuk pada eksplanasi dan intepretasi terhadap hasil yang bersifat induktif. Sehingga pertama-tama yang dilakukan ialah pemaparan dan penjabaran berbagi data (variable) khusus, kemudian ditarik suatu kesimpulan umum dari pemaparan tersebut. Hasil penelitian penulis dalam skripsi ini menunjukkan bahwa keputusan Korea Utara membatalkan upaya reunifikasi Korea karena persepsi pemimpin Korea Utara bahwa reunifikasi Korea akan merendahkan atau merugikan Korea Utara secara politik dan ideologi.

**Kata Kunci :** Reunifikasi Korea, Keputusan Korea Utara, Membatalkan, Ideologi, Politik

### Abstract

*Since the division of Korea into two states two opposing ideological and political in 1953. The division has an impact on the relations between the two Korea's are not harmonious. Efforts peace begins with open communication and mutual inter-Korean relations. Relationships between Korea no longer a rivalry and animosity however, Korean reunification-oriented cooperation. Reunification Korea efforts is the agreement between North Korea and South Korea Summit inter-Korea in 2000 to reunite the two Koreas into a new state of the state unified Korea. However, in 2009, North Korea made the decision to cancel the reunification of Korea. In a scientific article, the writer interested to analyze North Korea's decision to cancel the reunification of Korea agreed at Korean summit in 2000. The authors decided to analyze the Reunification of Korea because of complex background. Therefore, this study aims to find the factors of North Korea's decision to cancel the reunification of Korea in 2009. The research method employed by the authors is a qualitative research method. This method refers to the explanation and interpretation of the results is inductive. So the first thing done is the exposure and the translation of data sharing (variable) offer, then the general conclusion drawn from such exposure. The results in this paper the authors suggest that North Korea's decision to cancel the reunification of Korea because the North Korean leader's perception that the reunification of Korea would disparage or harm North Korea politically and ideologically.*

### Pendahuluan

Upaya menuju reunifikasi Korea dirintis oleh presiden Korea Selatan, Kim Dae Jung dengan mengadakan pertemuan antar Korea dalam rangka membentuk *Sunshine Policy* pada tahun 1998. Pertemuan dan kebijakan yang diusulkan Korea Selatan mendapat sambutan hangat dari Korea Utara sebagai bentuk timbal balik bantuan Korea

Selatan. Pertemuan ini dilanjutkan dalam pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) antar Korea yang diadakan pada tahun 2000. Rencana KTT Korea ini untuk membicarakan lebih serius ke arah reunifikasi Korea.<sup>[1]</sup> Oleh karena itu, Korea Selatan harus terus menjalankan usahanya baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendukung secara positif kebijakan unifikasi damai.

KTT antar Korea diadakan di Pyongyang pada tanggal 13–15 Juni 2000. Korea Selatan bersikeras menjalankan format reunifikasi dengan sistem konfederasi, memberi wewenang satu pemerintah pusat menjalankan fungsi diplomatik dan pertahanan, sedangkan pemerintah di bawah berfungsi administratif negara. Namun dalam KTT Korea, Korea Selatan mengusulkan format reunifikasi Korea adalah federasi yang berarti dua pemerintahan dua sistem sehingga usulan diterima Korea Utara. Korea Utara dan Korea Selatan bekerja secara independen dalam mengupayakan penyatuan Korea. KTT antar Korea ini menghasilkan dokumen yang berisikan lima poin kesepakatan.

Upaya-upaya reunifikasi terus berlanjut dari kedua belah pihak Korea. Dengan keberhasilan dari *Sunshine Policy* dan KTT antar Korea maka terbentuklah komunitas ekonomi Korea dan kebijakan Korea Utara yang menginginkan reunifikasi tanpa campur tangan asing. Menurut Kim Jong Il, pembicaraan mengenai reunifikasi Korea haruslah didasarkan pada prinsip “untuk bangsa kita sendiri”. [2] Terbentuknya Partai Persatuan Korea pada tahun 2003, Pertemuan Tingkat Menteri antar Korea yang berlangsung untuk mewujudkan tujuan *Sunshine Policy* dan KTT antar Korea dan yang terpenting adalah *Six Party Talk* yang dilaksanakan pada tahun 2003-2007 untuk mewujudkan perdamaian Semenanjung Korea dengan cara denuklirasi Korea Utara. Namun, reunifikasi Korea mengalami kebuntuan karena Korea Utara membatalkan semua jenis perjanjian atau kesepakatan dalam upaya reunifikasi Korea pada tanggal 30 Januari 2009. Padahal tujuan untuk reunifikasi Korea diharapkan mendatangkan kedamaian dan kemakmuran di Semenanjung Korea. [3]

Dalam tulisan ini penulis akan menganalisa mengenai mengapa Korea Utara membatalkan upaya reunifikasi Korea yang telah disepakati pada KTT Korea tahun 2000. Berdasarkan data yang didapat, penulis membuat suatu hipotesa bahwa keputusan Korea Utara membatalkan upaya reunifikasi Korea disebabkan oleh persepsi Korea Utara bahwa reunifikasi Korea akan merendahkan atau merugikan Korea Utara secara politik dan ideologi.

Dengan demikian, hal-hal pokok yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah mengenai gambaran umum dari Reunifikasi Korea, analisa mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi keputusan Korea Utara membatalkan upaya reunifikasi Korea. Adapun batasan waktu yang ditentukan oleh penulis ialah dalam rentang waktu mulai tahun 2000 hingga 2009.

[1]<http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2792.htm> diakses 5 juni 2012

[2]<http://www.rakyatmerdeka.co.id> diakses 9 Maret 2012

[3]<http://www.lampungpost.com> diakses 9 Maret 2012

### Metode Penelitian

Artikel ilmiah ini menggunakan metode penelitian metode pustaka. Sehingga penyusunannya banyak merujuk dan mengutip dari sumber-sumber pustaka dan artikel di internet. Pada tulisan ini penulis akan mengaplikasikan dua

kerangka dasar pemikiran. Pertama adalah teori persepsi. Teori ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi pemimpin Korea Utara tentang upaya reunifikasi Korea yang digagas oleh Korea Selatan. Di dalam buku Mohtar Mas’oed menjelaskan ketika menganalisa kebijakan suatu negara maka penting untuk mengetahui persepsi para pemegang kekuasaan karena mereka yang berbicara dan bertindak atas nama negara. Negara tidak melakukan tindakan namun, para pemimpin dan persepsi berperan menentukan perilaku suatu negara. [1] Dalam merumuskan suatu kebijakan, aktor individu tidak akan terlepas dari pengaruh ideosinkretis dan pemikiran rasional atau *rational choice*. Pengaruh ideosinkretis ini termasuk di dalamnya ideologi, kepercayaan, budaya dan tujuan dan lain sebagainya. Umumnya negara yang kebijakannya ditentukan oleh keputusan individu adalah negara otoriter atau sosialis dengan keadaan minim demokrasi. Misalnya, Kim Jong Il yang menjadikan karakter individunya sebagai manifestasi karakter nasional Korea Utara, segala sesuatu yang menyangkut masalah negara adalah hasil keputusan kepala negara yang tidak dapat diganggu gugat.

Persepsi dari para pelaku sebagai dasar orientasi pengambilan kebijakan dan persepsi menduduki tempat yang sentral dalam teori pembuatan kebijakan. [2] Kebijakan luar negeri sebagai instrumen untuk mewujudkan kepentingan nasional juga sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur internal negara, seperti power, identitas nasional, ideologi dan kepentingan. Menyadari keterbatasan yang dimiliki model strategi atau rasional, Richard Snyder menjelaskan bahwa *decision maker* memperlihatkan operasi dalam seting *dual aspect* yang menunjukkan bahwa faktor internal dan eksternal dapat menjadi saling berhubungan dalam aksinya menciptakan sebuah keputusan. [3] *Faktor internal* yaitu dinamika masyarakat kepada para pembuat keputusan. Berisi tentang cara masyarakat diorganisir dan berfungsi, karakter dan perilaku penduduk serta habitat fisik. Dinamika masyarakat terdiri dari orientasi nilai umum, pola pokok kelembagaan, ciri pokok organisasi sosial, pembedaan dan pengkhususan peranan serta fungsi dan jenis kelompok. *Faktor eksternal* yaitu kondisi dan faktor yang berbeda di luar ketentuan suatu negara, seperti aksi dan reaksi dari negara lain yang menjadi faktor pembuat keputusan negaranya.

[1] Mohtar Mas’oed. *Studi Hubungan Internasional Tingkat Analisis dan Teorisisasi*. Yogyakarta: UGM, 1989. Hlm. 1-19 (dalam <http://publikasi.umy.ac.id/index.php/hi/article/viewFile/791/1555> diakses 22 Mei 2012).

[2] Charles A. Mc Clelland. *Ilmu Hubungan Internasional Teori dan Sistem*. Jakarta: CV. Rajawali, 1986. Hlm. 168 (dalam <http://publikasi.umy.ac.id/index.php/hi/article/viewFile/791/1555> diakses 22 Mei 2012).

[3] <http://edukasi.kompasiana.com/2010/12/12/fokus-model-awal-dan-asumsi-asumsi-pendekatan-pembuatan-keputusan/> diakses 22 Mei 2012

### Hasil Penelitian

Hasil penelitian penulis dalam skripsi ini menunjukkan bahwa keputusan Korea Utara membatalkan upaya reunifikasi Korea karena persepsi pemimpin Korea Utara bahwa reunifikasi Korea akan merendahkan atau merugikan Korea Utara secara politik dan ideologi.

### Pembahasan

Upaya rekonsiliasi antar Korea telah dimulai sejak tahun 1970-an yang berdampak pada perubahan dramatis dalam hubungan Korea Utara-Korea Selatan. Serangkaian pembicaraan tingkat tinggi antara kedua Korea menghasilkan komunikasi bersejarah yang diumumkan di Seoul dan Pyongyang pada tanggal 4 Juli 1972. Kedua pemimpin Korea sepakat bahwa penyatuan kedua Korea akan dicapai secara independen tanpa campur tangan asing, dengan cara-cara damai tanpa perang dan melalui kesatuan nasional besar. Tiga prinsip rekonsiliasi dan reunifikasi disepakati serta dipertahankan selama tiga dekade berikutnya. Namun, tujuan mulia dari reunifikasi tidak tercapai karena disebabkan oleh perubahan hubungan internasional pada tahun 1980-an dan 1990-an.<sup>[1]</sup>

Upaya rekonsiliasi damai dan dialog antar Korea dimulai lagi pada tahun 1990-an ketika Korea Selatan dipimpin oleh Kim Young Sam (1993-1998). Upaya ini telah mendorong meningkatnya hubungan kerjasama ekonomi antar-Korea. Pada periode ini juga dilaksanakan pertemuan Palang Merah kedua Korea. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa pihak Korea Selatan mengajukan pertemuan reuni anggota keluarga yang terpisah sedangkan pihak Korea Utara meminta bantuan kemanusiaan kepada Korea Selatan. Bantuan kemanusiaan yang diberikan Korea Selatan untuk Korea Utara membuka hubungan yang lebih positif yaitu adanya reuni anggota keluarga terpisah antar Korea. Perkembangan selanjutnya pihak Korea Selatan menyerahkan bantuan berupa pupuk kimia rata-rata 300.000 ton pertahun dan pertemuan reuni anggota keluarga terpisah diadakan sebagai balasan dari Korea Utara. Namun, pihak Korea Selatan diperkirakan akan sulit menyerahkan bantuan yang besar.<sup>[2]</sup>

Hubungan antar-Korea berlanjut semakin membaik melalui *Sunshine Policy* yang dipelopori Presiden Korea Selatan, Kim Dae Jung pada tahun 1998. Pada masa pemerintahan Presiden Kim Dae-jung (1998-2003) terjadi peningkatan hubungan Korea Utara-Korea Selatan. Melalui sebuah kebijakan yang terkenal dengan nama *Sunshine Policy* atau Kebijakan Matahari Terbit, Korea Selatan melakukan pendekatan secara tidak langsung dengan Korea Utara dalam proses menuju reunifikasi. Tujuan utama kebijakan Korea Selatan ini adalah untuk melunakkan sikap Korea Utara dengan cara interaksi dan bantuan ekonomi. Kebijakan ini menyampaikan pesan bahwa Korea Selatan tidak ingin menyerap Korea Utara atau untuk melemahkan pemerintahnya tetapi, tujuannya adalah koeksistensi damai bukan perubahan rezim. Keberhasilan *Sunshine Policy* terhadap Korea Utara disambut baik dan telah menghasilkan peningkatan hubungan Korea.<sup>[3]</sup>

Keberhasilan tersebut lalu dilanjutkan oleh KTT Korea pada tahun 2000 yang telah menghasilkan *The South-North Joint Declaration* dan diadakannya *South-North Ministerial Meeting* atau Pertemuan Tingkat Menteri antar-Korea. Korea Utara juga menanggapi positif penyelenggaraan pertemuan puncak antar-Korea pada tahun 2000 yang berdampak pada meningkatnya hubungan ekonomi Korea Utara-Korea Selatan. Dibawah pemerintahan Kim Dae Jung, kerjasama antar Korea mengalami peningkatan yang signifikan yang belum pernah dicapai oleh para pemimpin Korea Selatan sebelumnya. Setelah KTT antar-Korea dilaksanakan, Korea Selatan mencoba merangkul Korea Utara dengan membangun hubungan diplomatik yang lebih baik dan memberi bantuan ekonomi.<sup>[4]</sup>

Keharmonisan dan keromantisan Korea Utara dan Korea Selatan tersebut hanya berlangsung sebentar. Setelah presiden Korea Selatan yang ke-15, Kim Dae-jung turun tahta dan digantikan oleh Presiden Roh Moo-hyun (2003-2008) dimana hubungan kedua Korea menjadi renggang. Pada masa Roh Moo-hyun haluan kebijakan Korea Selatan untuk Korea Utara menjadi berubah. Hal ini dibuktikan bahwa *Sunshine Policy* tidak lagi didukung semua pihak karena pada masa ini banyak rakyat Korea yang menganggap kebijakan tersebut hanya sebagai *mission impossible* Kim Dae-jung. *Sunshine Policy* digantikan oleh kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan masa Roh Moo-Hyun. Roh Moo-Hyun mengadopsi kebijakan kesejahteraan dan keterlibatan Korea Selatan terhadap Korea Utara serta akan terus bekerja menuju reunifikasi damai kedua Korea di abad ke-21. Roh Mho Yun juga tidak hentinya untuk menyatukan kedua Korea, namun usaha yang dilakukan seperti beberapa perundingan dua korea mengalami kegagalan. Hubungan kedua negara pun berangsur memburuk. Harapan terwujudnya reunifikasi nyaris pudar.<sup>[5]</sup>

Hubungan Korea Utara dan Korea Selatan semakin memburuk sejak terpilihnya Lee Myung-bak sebagai presiden baru Korea Selatan yang dilantik pada bulan Februari 2008. Tekad Lee Myung-bak untuk menjalankan kebijakan garis keras terhadap Korea Utara berkaitan dengan program nuklir Korea Utara. Korea Utara mengancam akan menggelar perang fisik dengan Korea Selatan jika pemerintah Lee Myung-bak tidak menghentikan kebijakan konfrontasinya. Tujuan mulia rekonsiliasi dan reunifikasi kedua Korea hanya dapat dicapai kembali jika kepemimpinan Korea Utara bersedia untuk menyerah dalam pengembangan senjata nuklir dengan menerima jaminan keamanan dan bantuan kemanusiaan dari negara-negara besar di Pertemuan Enam Pihak di Beijing. Kemudian reunifikasi kedua Korea secara damai dapat dicapai dengan jaminan persetujuan dan keamanan dari empat negara besar yang mengelilingi Semenanjung Korea termasuk Cina, Jepang, Rusia dan Amerika yang mempengaruhi arah masa depan rekonsiliasi dan reunifikasi kedua Korea.<sup>[6]</sup>

Kegagalan-kegagalan yang selalu muncul dalam upaya reunifikasi ini semakin membuat Korea Selatan terus melakukan pendekatan dengan Korea Utara. Kegagalan upaya reunifikasi Korea dari perang Korea sampai saat ini di karenakan adanya perbedaan ideologi dua negara yang

begitu mendasar. Korea selatan yang berideologikan demokrasi, sedangkan Korea Utara dengan ideologinya Komunis. Perbedaan ideologi yang sulit disatukan ini pada akhirnya membuat dua Korea mengalami kesenjangan ekonomi dua korea, timbul adanya saling curiga antar Korea dan muncul adanya instabilitas kawasan semenanjung dengan terciptanya dialog dan negosiasi antar dua korea merupakan suatu kemajuan yang cukup berarti dalam hubungan kedua Korea. Kegagalan upaya reunifikasi tersebut semakin memuncak hingga adanya keputusan Korea Utara membatalkan upaya reunifikasi Korea. Penulis akan menjelaskan tentang beberapa faktor-faktor yang mendasari keputusan Korea Utara membatalkan upaya reunifikasi Korea. Upaya reunifikasi Korea telah disepakati sejak KTT antar Korea pada tahun 2000.

Berikut adalah faktor internal yang menjadi pertimbangan keputusan Korea Utara berdasar persepsi pemimpin Korea Utara. Pertama kekhawatiran berubahnya sistem komunis menjadi kapitalisme. Kekhawatiran Korea Utara dikarenakan bocornya dokumen-dokumen rahasia berisi kawat diplomatik kedutaan besar Amerika Serikat di situs jejaring Wikileaks yang menambah ketegangan di kawasan Semenanjung Korea. Dokumen tersebut berisi tentang keyakinan Korea Selatan dan Amerika Serikat bahwa rencana reunifikasi Korea dengan tampuk kepemimpinan berada di tangan Korea Selatan akan memiliki prospek bagus dan kemungkinan terwujud. Selain keyakinan akan lancarnya skenario reunifikasi Korea di bawah promotor Korea Selatan, rahasia yang dikirim Duta Besar AS untuk Korea Selatan bernama Kathleen Stephens mencantumkan tentang skenario jatuhnya rezim komunis Korea Utara sebagai langkah awal upaya reunifikasi. Korea Selatan dan AS menilai bahwa masalah Semenanjung Korea akan damai dan reunifikasi Korea akan terwujud, jika rezim komunisme Korea Utara runtuh.<sup>[7]</sup>

Kedua kekhawatiran runtuhnya kekuasaan kepemimpinan di Korea Utara. Dalam sejarah Korea Utara, Kim Il-sung sebagai pendiri Republik Demokratik Rakyat Korea dan Kim Jong-il yang memimpin Korea Utara pada saat Perang Dingin. Kedua tokoh Korea Utara tersebut adalah nilai oleh masyarakatnya sebagai orang kuat yang mampu melakukan kontrol atas semua hal dan kepentingan yang terjadi dalam nasional Korea Utara. Sebuah kekuatan dan kekuasaan rezim komunisme berupa legitimasi pemerintah yang menguasai Korea Utara hingga saat ini. Dengan gambaran sistem nasional Korea Utara yang seperti itu, Korea Selatan mengetahui bahwa Korea Utara tidak mau merubah *de facto* pemimpin Kim Jong-il dan para elit yang berkuasa. Maka satu-satunya cara agar Korea Utara bisa bersatu dengan Korea Selatan adalah merubah Korea Utara menjadi negara demokrasi yaitu berbasis pada pemilihan umum.<sup>[8]</sup>

Sedangkan faktor eksternal yang menjadi pertimbangan Korea Utara antara lain pertama pengurangan bantuan ekonomi oleh Korea Selatan. Korea Utara mengakhiri semua hubungan dengan Korea Selatan pada tahun 2009, di tengah kemarahan terhadap kebijakan garis keras presiden baru Korea Selatan yang konservatif. Presiden konservatif Lee Myung-Bak yang mulai menjabat pada tahun 2008 mengakhiri kebijakan bantuan dan

keterlibatan Korea Selatan terhadap Korea Utara. Korea Selatan menghentikan bantuan tanpa syarat pada Korea Utara dan mengaitkan bantuan tersebut dengan upaya pelucutan proyek nuklir Korea Utara. Padahal sumber dana terbesar Korea Utara adalah bantuan dan dana dari Korea Selatan.<sup>[9]</sup> Tindakan Lee Myung Bak dikenal lebih keras daripada pemerintah pendahulunya. “Jika kelompok pengkhianat Lee Myung Bak tetap menempuh jalan konfrontasi dengan Korea Utara, memfitnah martabatnya meskipun telah berkali-kali diperingatkan Korea Utara maka akan mendorong pihaknya membuat suatu keputusan yang sulit, termasuk membekukan seluruh hubungan Korea Utara dan Korea Selatan” kata surat kabar partai komunis Korea Utara di dalam komentarnya.<sup>[10]</sup>

Kedua *bargain* bantuan Korea Selatan dengan militer Korea Utara. Kebijakan reunifikasi tentang militer justru berdampak pada usaha Korea Utara mengatasi kesulitan ekonominya selalu mendapat hambatan karena kepemilikan teknologi nuklirnya. Negara-negara yang diharapkan menjadi calon investor asingnya sering mengkaitkan masalah teknologi nuklir Korea Utara dengan rencana investasi modal dan bantuan ekonomi mereka untuk Korea Utara. Sebagai timbal baliknya Korea Utara harus mengkorbankan senjata nuklirnya demi mendapatkan investasi dan bantuan asing agar perekonomiannya stabil. Hubungan bantuan perekonomian dengan program nuklir yang dimiliki Korea Utara merupakan suatu bentuk *bargain* bagi Korea Utara karena nuklir merupakan senjata kebanggaan Korea Utara namun, disisi lain Korea Utara membutuhkan bantuan negara lain demi meningkatkan perekonomian negaranya sehingga dapat mensejahterakan rakyatnya. Maka Korea Utara menghadapi posisi krusial untuk mengambil keputusan dalam hal perekonomian sekaligus militernya.

Ketiga kekhawatiran dominasi ekonomi Korea Selatan terhadap Korea Utara. Jika integrasi ekonomi terjadi maka sebuah Korea bersatu bisa cepat menjadi kekuatan ekonomi utama Asia dan dunia. Kedua Korea menyadari perubahan ekonomi dan politik dalam reunifikasi akan membawa dampak baik bagi bangsa Korea. Korea Utara memiliki banyak sumber daya alam seperti bijih timah dan seng yang dapat meningkatkan kemakmuran ekonomi dengan ekonomi berbasis manufaktur ekspor Korea Selatan. Selain itu, Korea Utara terletak di daerah yang dinamis dan ekonomi berkembang pesat dengan semangat kewirausahaan Korea Utara.<sup>[11]</sup> Namun, Korea Utara perlu berpikir tentang resiko integrasi ekonomi untuk mencegah hal-hal yang terjadi pasca reunifikasi dengan ekonomi tunggal yang dominan dan terkuat. Dengan adanya reunifikasi dikhawatirkan juga sejumlah besar warga Korea Selatan akan mengklaim kepemilikan tanah di Korea Utara. Prioritas utama dari semua kekhawatiran ini adalah harus cepat mengembangkan perekonomian Korea Utara sehingga kepemilikan tanah akan lebih baik digunakan dalam proyek infrastruktur dan menarik investasi di Korea Utara.<sup>[12]</sup>

Keempat campur tangan Amerika Serikat. Korea Selatan harus menjalankan usahanya secara langsung maupun tidak langsung untuk mendukung secara positif kebijakan reunifikasi damai. Keinginan dan cita-cita Korea Selatan untuk dapat mewujudkan reunifikasi sedang



diupayakan namun, terhalang adanya konflik yang terjadi antara Amerika Serikat sebagai sekutu Korea Selatan dengan Korea Utara pada bulan September 2002. Ketegangan ini dikarenakan tindakan provokatif presiden George W. Bush yang menyatakan Korea Utara adalah termasuk dalam negara *Axis of Evil* yang harus ditaklukkan, pernyataan ini ditanggapi sangat sensitif oleh Korea Utara.[13] Selain adanya konflik antara Korea Utara dengan AS, ditambah juga dengan adanya latihan militer bersama yang dilakukan Korea Selatan dengan AS. Padahal untuk mewujudkan reunifikasi dan rekonsiliasi antara Korea Selatan dan Korea Utara ini dibutuhkan saling pengertian antara kedua belah pihak. Saling menjaga sikap antara Korea Utara dan Korea Selatan juga sangat menentukan berjalannya proses reunifikasi Korea. Maka kehadiran Amerika Serikat merupakan faktor eksternal dalam hubungan Korea Utara-Korea Selatan dan mempengaruhi upaya rekonsiliasi Korea Selatan. Menurut Kim Jong Il pembicaraan reunifikasi Korea haruslah didasarkan pada prinsip untuk bangsa kita sendiri.[14]

Pertimbangan dari faktor internal dan eksternal ini menghasilkan persepsi Korea Utara tentang upaya reunifikasi. Persepsi terhadap upaya reunifikasi Korea Utara ini berdasarkan sudut pandang pemimpin Korea Utara, Kim Jong il sebagai penentu keputusan dominan. Dari berbagai tindakan yang terkait dengan upaya reunifikasi Korea yang meliputi ideologi, politik, ekonomi dan militer yang dipersepsikan secara negatif oleh Kim Jong il maka Korea Utara bersikap membuat keputusan membatalkan upaya reunifikasi Korea pada tanggal 30 Januari 2009.[15] Berdasarkan pemaparan di atas penulis berargumen bahwa keputusan Korea Utara membatalkan upaya reunifikasi Korea disebabkan oleh persepsi Korea Utara bahwa reunifikasi Korea akan merendahkan atau merugikan Korea Utara secara politik dan ideologi.

[1]<http://www.iic.edu/Main/AboutUs/publications/IICKoreaDivisionImpact.htm> diakses 9 Maret 2012

[2][http://world.kbs.co.kr/indonesian/news/news\\_newissue\\_detail.htm?No=1424&id=newissue](http://world.kbs.co.kr/indonesian/news/news_newissue_detail.htm?No=1424&id=newissue) diakses 1 November 2012

[3]<http://www.iic.edu/Main/AboutUs/publications/IICKoreaDivisionImpact.htm> diakses 9 Maret 2012

[4][http://world.kbs.co.kr/indonesian/news/news\\_newissue\\_detail.htm?No=1424&id=newissue](http://world.kbs.co.kr/indonesian/news/news_newissue_detail.htm?No=1424&id=newissue) diakses 1 November 2012

[5]<http://politik.kompasiana.com> diakses 5 Juni 2012

[6] *Ibid.*

[7]<http://www.kawasanperbatasan.com/konflik-kawasan-perwujudan-kepentingan-nasional-bertetangga/> diakses 25 Juni 2012

[8] <http://www.dominicantoday.com> diakses 25 Juni 2012

[9] <http://www.pelita.or.id/cetakartikel.php?id=57280> diakses 1 November 2012

[10] <http://www.suarakarya-online.com/news.html> diakses 22 Oktober 2012

[11]<http://www.country-data.com/cgi-bin/query/r-9644.html> diakses 25 September 2012

[12]<http://www.gallup.com/poll/24949/gallup-world-poll-implications-reunification-two-koreas.aspx> diakses 9 Maret 2012

[13]<http://www.opendemocracy.net/opensecurity/javier-delgado-rivera-young-il-kim/korea-after-reunification-challenges-and-opportuniti> diakses 9 Maret 2012

[14]<http://www.rakyatmerdeka.co.id> diakses 9 Maret 2012

[15] <http://www.bluefame.com/topic/170630-ketegangan-di-semenanjung-korea-meningkat/> diakses 5 November 2012

## Kesimpulan

Berdasarkan pemaparannya penulis kemudian mengambil kesimpulan bahwa keputusan Korea Utara membatalkan upaya reunifikasi berdasar adanya faktor internal dan eksternal Korea Utara dalam reunifikasi Korea. Faktor internal yang menjadi pertimbangan Korea Utara antara lain kekhawatiran berubahnya sistem komunisme menjadi kapitalisme. Sehingga akan meruntuhkan kekuasaan kepemimpinan di Korea Utara. Dengan adanya dukungan Amerika Serikat berupa materi maupun non materi maka Korea bersatu pasti akan terbentuk mengarah pada aliran ideologi Amerika Serikat seperti yang dianut Korea Selatan. Sistem yang akan dianut Korea bersatu adalah sebagai negara berideologi demokrasi dan liberal kapitalisme. Dengan begitu, sistem politik Korea Utara yang komunisme akan seutuhnya hilang dan legitimasi rezim yang berbasis pemilihan umum. Sistem ekonomi Korea Utara akan berbasis pada liberal kapitalisme dimana pasar diatur oleh swasta bukan pemerintah. Dengan secara tidak langsung Korea Selatan merendahkan ideologi Korea Utara sebagai ideologi yang tidak lebih baik dari ideologinya.

Faktor eksternal yang menjadi pertimbangan Korea Utara antara lain dikarenakan Korea Selatan memberi syarat kepada Korea Utara yaitu bantuan ekonomi dapat kembali normal jika Korea Utara bersedia melakukan denuklirisasi kekuatan militernya demi kepentingan reunifikasi Korea. Sehingga Korea Utara menganggap adanya *bargain* antara bantuan ekonomi Korea Selatan dengan militer Korea Utara. Hal tersebut merendahkan kekuatan militer Korea Utara sebagai negara nuklir. Padahal Korea Utara berobsesi menjadi negara nuklir terkuat di dunia dan disegani oleh negara lain. Korea Utara menyimpulkan bahwa Korea Selatan lebih diuntungkan dengan adanya berbagai taktik dan tujuan Korea Selatan dalam reunifikasi Korea.

Pertimbangan dari faktor internal dan eksternal ini menghasilkan persepsi Korea Utara tentang upaya reunifikasi. Persepsi upaya reunifikasi Korea Utara ini berdasarkan sudut pandang pemimpin Korea Utara, Kim Jong il sebagai penentu keputusan dominan. Dari terbentuknya faktor-faktor dan persepsi Kim Jong il maka Korea Utara bersikap membuat keputusan membatalkan upaya reunifikasi Korea pada tanggal 30 Januari 2009. Keputusan Korea Utara membatalkan upaya reunifikasi Korea disebabkan oleh persepsi Korea Utara bahwa reunifikasi Korea akan merendahkan atau merugikan Korea Utara secara politik dan ideologi. Sikap Korea Utara ini

untuk memberi ancaman atas sikap konservatif Korea Selatan dalam reunifikasi Korea. Maka menurut penulis, Dengan adanya berbagai hambatan dalam proses upaya reunifikasi tampaknya *status quo* di Semenanjung Korea akan tetap. Karena yang terjadi kemudian hanyalah sebuah rekonsiliasi yang ditentukan oleh kedua negara ini sendiri sebagai satu bangsa Korea.

### Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu sempurnanya artikel ilmiah ini. Khususnya kepada para dosen pembimbing (Drs. Abubakar Eby Hara, MA,Ph.D dan Suyani Indriastuti, S.Sos.,M.Si) yang membantu dan membimbing penulis demi terselesaikannya skripsi penulis. Karena skripsi penulis yang berjudul; “Keputusan Korea Utara Membatalkan Upaya Reunifikasi Korea” merupakan rujukan utama dari artikel ilmiah ini. Tidak lupa ucapan terima kasih kepada ketua dosen penguji skripsi penulis (Drs. M. Nur Hasan, M.Hum) yang telah membantu memberi masukan dan mereview hasil penulisan artikel ilmiah ini.

### Daftar Pustaka

- [1] <http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2792.htm> diakses 5 Juni 2012
- [2] <http://www.rakyatmerdeka.co.id> diakses 9 Maret 2012
- [3] <http://www.lampungpost.com> diakses 9 Maret 2012
- [4] Mohtar Mas' oed. *Studi Hubungan Internasional Tingkat Analisis dan Teorisasi*. Yogyakarta: UGM, 1989. Hlm.1-19 (dalam <http://publikasi.umy.ac.id/index.php/hi/article/viewFile/791/1555> diakses 22 Mei 2012).
- [5] Charles A. Mc Clelland. *Ilmu Hubungan Internasional Teori dan Sistem*. Jakarta: CV.Rajawali, 1986. Hlm.168 (dalam <http://publikasi.umy.ac.id/index.php/hi/article/viewFile/791/1555> diakses 22 Mei 2012).
- [6] <http://edukasi.kompasiana.com/2010/12/12/fokus-model-awal-dan-asumsi-asumsi-pendekatan-pembuatan-keputusan/> diakses 22 Mei 2012
- [7] <http://www.iic.edu/Main/AboutUs/publications/IICKorea/DivisionImpact.htm> diakses 9 Maret 2012
- [8] [http://world.kbs.co.kr/indonesian/news/news\\_newissue\\_detail.htm?No=1424&id=newissue](http://world.kbs.co.kr/indonesian/news/news_newissue_detail.htm?No=1424&id=newissue) diakses 1 November 2012
- [9] <http://politik.kompasiana.com> diakses 5 Juni 2012
- [10] <http://www.kawasanperbatasan.com/konflik-kawasan-perwujudan-kepentingan-nasional-bertetangga/> diakses 25 Juni 2012
- [11] <http://www.dominicantoday.com> diakses 25 Juni 2012
- [12] <http://www.pelita.or.id/cetakartikel.php?id=57280> diakses 1 November 2012
- [13] <http://www.suarakarya-online.com/news.html> diakses 22 Oktober 2012
- [14] <http://www.country-data.com/cgi-bin/query/r-9644.html> diakses 25 September 2012

[15] <http://www.gallup.com/poll/24949/gallup-world-poll-implications-reunification-two-koreas.aspx> diakses 9 Maret 2012

[16] <http://www.opendemocracy.net/opensecurity/javier-delgado-rivera-young-il-kim/korea-after-reunification-challenges-and-opportuniti> diakses 9 Maret 2012

[17] <http://www.rakyatmerdeka.co.id> diakses 9 Maret 2012

[18] <http://www.bluefame.com/topic/170630-ketegangan-di-semenanjung-korea-meningkat/> diakses 5 November 2012